



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI JUMAT, 8 FEBRUARI 2013**



DAFTAR ISI

Monorel .....	1
Moratorium Batubara .....	2
Pabrik Feronikel .....	3
Pabrik Semen .....	4
Jalan Tol .....	5
Monorail .....	6



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☒ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain, .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Konsorsium BUMN Siap Lanjutkan Proyek Monorel	<div>- Menurut Direktur Utama PT. Adhi Karya Tbk, Kiswodarmawan, konsorsium sudah menyelesaikan cetak biru dan segera menyerahkan ke pemerintah untuk segera di telaah</div> <div>- Proyek monorel ini rencananya akan dikerjakan sepanjang 52,12 km dengan rute meliputi Bekasi Timur – Cawang, Cibubur-Cawang, serta Cawang-Kuningan</div>	2014		Rp. 7,3 triliun		

Konsorsium BUMN Siap Lanjutkan Proyek Monorel

Rutenya meliputi Bekasi Timur-Cawang, Cibubur-Cawang dan Cawang- Kuningan

Ragil Nugroho

JAKARTA. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bersama empat badan usaha milik negara (BUMN) lainnya yang terdiri dari PT Industri Kereta Api (Inka), PT Lembaga Elektronik Negara (LEN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) membentuk konsorsium untuk melanjutkan proyek monorel dengan rute Bekasi - Kuningan dan Cibubur - Kuningan.

Berdasarkan master plan yang mereka ajukan, estimasi biaya untuk mengerjakan proyek transportasi masal tersebut mencapai Rp 7,3 triliun.

Menurut Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk Kiswodarmawan, konsorsium sudah menyelesaikan cetak biru dan segera menyerahkan ke pemerintah untuk segera ditelaah. "Kami sudah ajukan dan harapannya bisa segera disetujui. Mudah-mudahan sekitar kuartal IV 2013 sudah keluar izin berupa Peraturan Presiden (Perpres)," ujar Kiswodarmawan, Kamis (7/2).

Kiswodarmawan bilang, pihaknya membentuk konsorsium setelah memperoleh penugasan dari Kementerian BUMN untuk membantu

mengurai kemacetan di Jakarta. Adapun dari estimasi investasi awal tersebut, ia merencanakan sekitar 70% berasal dari kocek konsorsium dan sisanya dari pinjaman perbankan.

Proyek monorel ini rencananya akan dikerjakan sepanjang 52,12 km dengan rute meliputi Bekasi Timur - Cawang, Cibubur-Cawang, serta Cawang - Kuningan.

Cetak biru proyek monorel tersebut tinggal menunggu persetujuan.

Untuk proyek monorel tahap satu yakni rute Bekasi Timur - Cawang, rencananya akan mulai dibangun 2014 dan bisa beroperasi tahun 2017.

Bila proyek ini sudah berjalan, bisa mengangkut penumpang sebanyak 30.000 orang per hari. Dan diprediksi bisa menghemat pengeluaran BBM dari mobil pribadi senilai Rp 5 miliar per hari. "Atau bisa menghemat Rp 1,5 triliun per tahunnya," katanya.

Izin lintas Kementerian

Menurut Kiswodarmawan, dengan menggunakan monorel jarak tempuh dari Bekasi Timur menuju Cawang diprediksi cuma 24 menit saja. Adapun dari Cibubur ke Cawang sekitar 18 menit serta dari Cawang ke Kuningan hanya 15 menit.

Ia pun yakin, dengan jarak tempuh yang relatif singkat, masyarakat yang biasa memakai kendaraan pribadi bakal memilih naik monorel ketimbang harus bermacam ria di jalan raya atau jalan tol.

Saat ini, Adhi Karya tengah mensurvei kepada sejumlah masyarakat yang menjadi potensi pasar monorel soal besaran tiket monorel yang masuk akal. Adapun sasaran konsumen utama pengguna monorel adalah masyarakat menengah ke atas.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan monorel lanjutan tersebut. "Yang penting tujuannya jelas untuk mengurai kemacetan dan harus terintegrasi dengan sarana publik lainnya," tegas Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyatakan, usulan cetak biru monorel ala Adhi Karya dan ka-

wan-kawan ini juga harus dibicarakan dan diputuskan lintas Kementerian. Mulai dari Kementerian Koordinasi Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Saat ini Jokowi telah me-

nyetujui pelaksanaan proyek monorel lama yang terbengkalai menjadi tiang monorel.

Ia sudah menunjuk pelaksana proyek monorel yakni Jakarta Monorail yang rencananya menggandeng Jusuf Kalla lewat bendera Hadji Kalla Group.

Proyek Monorel Adhi Karya

Rute	Bekasi Timur - Cawang
	Cibubur - Cawang
	Cawang - Kuningan
Jarak	52,1 km

Rencana harga tiket

Rute	Tarif
Bekasi Timur-Cawang	Rp 15.000
Cibubur-Cawang	Rp 15.000
Cawang-Kuningan	Rp 10.000

Proyek Monorel Jakarta Monorail

Nama	Rute	Panjang
Jalur Biru	Sentral Timur Jakarta-Pondok Kepala-Kampung Melayu-Tebet-Kuningan-Casablanca-Tanah Abang-Roxy-Taman Anggrek-Puri Indah	30 km
Jalur Hijau	Kuningan -Gatot Subroto-Senayan-Asia Afrika-Pejompongan-Karet-Dukuh Atas-Kuningan	14,5 km

Sumber : Wawancara dan Jakarta Monorail







Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

☐ Kompas ☐ Media Indonesia ☐ Koran Tempo ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Republika ☐ Sinar Harapan ☐ Suara Pembaruan ☐ Pikiran Rakyat  
☐ Rakyat Merdeka ☐ Seputar Indonesia ☐ Investor Daily ☒ Kontan ☐ Lain-lain,  
☐ Suara Karya ☐ Neraca ☐ Jurnal Nasional ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pengusaha Mendukung Moratorium Batubara	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dengan moratorium, APBI berharap proses Clean and Clear (CnC) untuk IUP yang tumpang tindih tersebut dapat segera diselesaikan oleh pemerintah</li><li>- Setelah proses CnC selesai, pemerintah juga harus segera menerbitkan julkak dan juknis tata cara pelelangan IUP pengusahaan batubara agar seluruh pemerintah daerah bisa menerbitkan IUP sesuai dengan amanat UU No.4/2009</li></ul>					

# Pengusaha Mendukung Moratorium Batubara

Sejak terbit UU Minerba memang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru tidak boleh terbit

Muhammad Yazid,  
Dimas Kresna Duta

JAKARTA. Pemerintah menyatakan moratorium penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) baru untuk pengusahaan batubara di Kalimantan Timur memang sudah sepatutnya dilakukan. Apalagi, sebenarnya, pemerintah juga telah menghentikan penerbitan IUP baru.

Seperti diketahui, Gubernur Kaltim Awang Faroek menerbitkan surat edaran pada 25 Januari 2013 lalu kepada bupati dan walikota se-Kaltim pemilik lahan pertambangan batubara. Isi surat itu tentang moratorium IUP baru di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Edi Prasodjo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, sejak penerapan UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, seharusnya tidak lagi mengeluarkan IUP bagi perusahaan batubara. "Memang sudah lama IUP baru tidak diberikan, jadi tidak ada ma-

salah," kata dia, usai menggelar diskusi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamis (7/2).

Berdasarkan UU 4/2009 Pasal 60, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan harus didapatkan dengan cara lelang. Selanjutnya, tata cara penyerahan IUP baru tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan.

Namun, Edi mengatakan, hingga saat ini, peraturan turunan yang menjelaskan tata cara lelang tersebut belum diterbitkan pemerintah. Akibat, IUP pengusahaan batubara yang terbit setelah lahirnya UU Minerba dianggap melanggar peraturan. "Kalaupun ada perusahaan pertambangan batubara yang mulai beroperasi belakangan ini, sebetulnya itu menggunakan IUP lama, sebelum 2009," jelasnya.

Ia menambahkan, surat edaran yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur hanya untuk penegasan kepada seluruh kabupaten/kota agar menghentikan penerbitan izin baru. Apalagi, pertambangan penda melarang IUP baru tersebut berdasarkan

pertimbangan lingkungan.

Menurut Edi, Kementerian ESDM juga tidak mengkhawatirkan akan adanya penurunan produksi akibat pemberlakuan moratorium itu. Sebab, pemerintah telah mewajibkan adanya ketersediaan pasokan batubara untuk di dalam negeri atau *domestic market obligation* (DMO). "Kami akan menindak tegas perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Kami akan pantau setiap bulan. Sanksinya bisa penurunan kuota produksi perusahaan hingga 50%," jelasnya.

### Pengusaha setuju

Supriatna Sahala, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) menjelaskan, IUP baru memang belum boleh diterbitkan pemerintah daerah lantaran petunjuk pelaksanaan (julkak) dan petunjuk teknis (juknis) lelang WIUP belum diterbitkan pemerintah. "Memang ada sejumlah kabupaten maupun kota yang tetap memberikan izin setelah UU Nomor 4/2009 dengan tata cara berdasarkan peraturan daerah," imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendukung surat edaran yang diterbitkan Gubernur Kalimantan Timur tersebut. Bahkan, Supriatna mendorong untuk diikuti oleh gubernur lain agar pengusahaan batubara di Tanah Air bisa diterbitkan. Apalagi, dari 6.000 IUP yang sudah diterbitkan sebagian besar tumpang tindih.

Dengan moratorium, APBI berharap proses *clean and*

*clear* (CnC) untuk IUP tumpang tindih tersebut dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.

Supriatna bilang, setelah proses CnC selesai, pemerintah juga harus segera menerbitkan julkak dan juknis tata cara pelelangan IUP pengusahaan batubara agar seluruh pemerintah daerah bisa menerbitkan IUP sesuai dengan amanat UU No 4/2009. ■

### Beleid Moratorium Percuma

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) menilai surat edaran Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek kepada para bupati dan walikota se-Kalimantan Timur (Kaltim) mengenai moratorium pemberian izin baru pertambangan, tidak akan optimal. Beleid tersebut tidak akan berpengaruh besar dalam mengurangi area hutan Kaltim yang rusak. "Soalnya, perusahaan lama yang telah mendapatkan izin pengelolaan dan selama ini merusak hutan tidak ditindak tegas oleh Gubernur," kritik Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif Walhi, kemarin.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Kaltim, S. Adiyat mengakui adanya kerusakan hutan akibat kegiatan pertambangan di Kaltim memang sudah sangat parah. "Makanya para Bupati dan Walikota juga mesti melakukan evaluasi terhadap perusahaan batubara yang sudah berproduksi. Kita minta para bupati dan walikota itu untuk tidak membuka lahan baru dulu sebelum ada evaluasi menyeluruh," kata dia. ■



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Antam Membangun Pabrik Feronikel Line-4	<div><div>PT. Aneka Tambang, Tbk (ANTM) tak henti menggelar ekspansi usaha. Emiten yang kerap disebut Antam ini, akan membangun line-4 pabrik feronikel ti pomalaa, Sulawesi Tenggara</div><div>Pembangunan line-4 ini membuat Antam akan menghentikan operasi furnace-1 yang di pabrik FeNi. Nantinya, operasi furnace I berkapasitas 17MW akan digantikan oleh operasi furnace-4 yang memiliki 38 MW</div></div>			US\$102 Juta	Kawasaki Heavy Industries dan PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA)	

■ EKSPANSI EMITEN

Antam Membangun Pabrik Feronikel Line-4

JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tak henti menggelar ekspansi usaha. Emiten yang kerap disebut Antam ini, akan membangun line-4 pabrik feronikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Nilai investasi membangun pabrik ini sebesar US\$ 102 juta. Pembangunan pabrik tersebut menggunakan jasa konsorsium yang digawangi oleh Kawasaki Heavy Industries Ltd dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Teddy Badrujaman, Sekretaris Perusahaan Antam menuturkan, dana investasi pembangunan pabrik bakal sepenuhnya ditanggung perusahaan. "Kawasaki dan WIKA

statusnya sebagai kontraktor *engineering, procurement and construction*(EPC)," kata dia, Kamis (7/2). Pembangunan line-4, bagian dari proyek perluasan pabrik feronikel (P2F) Pomalaa.

Total investasi proyek ini mencapai US\$ 450 juta-US\$ 500 juta. Dana tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pabrik feronikel. Proyek ini terdiri dari delapan paket pekerjaan yaitu pembangunan *jetty & facilities, belt conveyors*, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berkapasitas 2x30 megawatt (MW).

Pembangunan line-4 ini membu-

at Antam akan menghentikan operasi furnace-I yang di pabrik FeNi I. Nantinya, operasi furnace-I berkapasitas 17 MW akan digantikan oleh operasi furnace-I yang memiliki kapasitas 38 MW.

Antam juga memperkuat bisnis pertambangan emas. Antam telah mendapat restu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membeli 7,5% saham PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dari Newcrest Mining Limited.

Transaksi penambahan kepemilikan saham itu bernilai US\$ 160 juta. Antam bakal membayar

transaksi melalui dua tahap yaitu secara tunai senilai US\$ 130 juta. Sementara sisanya ditentukan Desember 2017. Selepas transaksi, kepemilikan saham Antam pada NHM menjadi 25% dari 17,5%. Sebaliknya, kepemilikan saham Newcrest turun menjadi 75% dari sebelumnya yang masih 82,5%.

Hingga saat ini, Antam dan Newcrest sudah menambah sekitar 6 juta ons emas. Tahun ini, Antam mengincar kenaikan produksi emas 16% menjadi 3,3 ton. Sementara feronikel 18.000 ton nikel (TNI).

Veri Nurhansyah Tragistina





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

Halaman:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☒ Kontan

☐ Lain-lain,

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Koperasi Warga Semen Gresik Bikin Pabrik	<div>- Koperasi yang bernaung di PT. Semen Gresik Tbk ini berencana mendirikan pabrik untuk memproduksi bahan-bahan kebutuhan bangunan</div> <div>- KWSG juga berencana mendaftarkan unit usaha barunya itu menjadi Perseroan Terbatas atau PT</div>		2014	Rp. 250 miliar		Proses konstruksi dan tender

Koperasi Warga Semen Gresik Bikin Pabrik

GRESIK. Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) menjajaki peluang bisnis baru dengan masuk ke sektor manufaktur. Koperasi yang bernaung di PT Semen Gresik Tbk ini berencana mendirikan pabrik untuk memproduksi bahan-bahan kebutuhan bangunan. Pembangunan fisik pabrik dimulai tahun ini dan ditargetkan selesai akhir 2014.

KWSG percaya diri membentuk unit usaha baru yang bergerak di produksi bahan bangunan lantaran memiliki aset senilai Rp 620 miliar pada akhir 2012. Sebagian aset ini ingin dikembangkan lagi ke usaha produktif agar manfaat yang diterima anggota koperasi semakin baik.

Bahan bangunan yang akan diproduksi antara lain plafon, genting, keramik hingga semen. Pengelola koperasi menargetkan anak usaha ini akan menopang bisnis hingga 85%.

Manajemen koperasi memperkirakan pembangunan pabrik di Mojokerto, Jawa Timur itu akan menghabiskan biaya hingga Rp 250 miliar. Edi Kartika, Ketua Pengurus Koperasi KWSG mengatakan, setelah memiliki lini bisnis jasa dan distribusi, pihaknya kini mencoba masuk ke sektor produksi.

"Sektor manufaktur bukan hal baru buat kami. Sebelumnya kami juga menangani distribusi semen. Di sektor baru ini nantinya kami akan mem-

produksi barang langsung," kata Edi. Ia menambahkan, nantinya pabrik akan memiliki kapasitas produksi hingga 100 ribu ton pertahun.

Edi bercerita, saat ini pembangunan pabrik mulai masuk pengerjaan konstruksi. Proses tender pun akan digelar dalam waktu dekat ini.

Sambil mendirikan pabrik, KWSG juga berencana mendaftarkan unit usaha barunya itu menjadi Perseroan Terbuka atau PT, sesuai arahan Kementerian Koperasi belum lama ini.

KWSG juga berencana membangun 19 outlet baru di kota-kota Jawa, Sumatra dan Kalimantan. "Untuk kotanya kami sedang cari yang me-

mang potensial. Kami bidik tiga pulau tersebut. Targetnya akhir tahun ini outlet kami mencapai 52 unit," kata Edi.

Ia menambahkan, lewat penambahan kantor cabang, KWSG menargetkan omzet tumbuh 23% menjadi Rp 2,1 triliun. Perolehan sisa hasil usaha (SHU) tumbuh 30% menjadi Rp 85 miliar. Sedangkan aset tumbuh 33% menjadi Rp 830 miliar di tahun ini.

Langkah KWSG ini tentu patut ditiru koperasi lain. Sudah seharusnya dana anggota diinvestasikan ke usaha riil agar meraih manfaat lebih besar, bukan disalahgunakan segelintir oknum pengurus.

Mona Tobing



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☒ Lain-lain, .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalan Tol Cikampek-Palimanan selesai Tahun Ini	<div>- Ruas Cikampek-Palimanan hingga menjelang akhir tahun ini masih dipusingkan oleh belum selesainya sebagian pembebasan lahan</div> <div>- Pembebasan lahan ini tidak hanya mengganggu pembangunan jalan tol, tapi juga kалан lain, seperti akses ke Bandara Kuala Namu</div>		2013			Tahap pembebasan lahan

JALAN TOL  
CIKAMPEK-PALIMANAN  
SELESAI TAHUN INI

Jalan tol Jakarta-Surabaya ditargetkan sudah dipakai pada Lebaran tahun depan.

JAKARTA — Pemerintah menyatakan Jakarta dan Surabaya sudah tersambung jalan tol seluruhnya pada Lebaran tahun depan. Tiga ruas tol di antaranya, seperti Cikampek-Palimanan, dijadwalkan sudah bisa dilewati tahun ini.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak kemarin mengatakan jalan tol Jakarta-Surabaya tidak akan mungkin selesai tahun ini. "Tapi Lebaran satu lagi [bisa digunakan]," katanya. "Ya, kita realistis saja."

Hermanto menyatakan beberapa ruas yang sudah bisa digunakan tahun ini adalah Semarang-Bawen, Surabaya-Gempol, dan Cikampek-Palimanan. Semarang-Bawen sudah digunakan sebagian, yakni Semarang-Ungaran.

Adapun ruas Cikampek-



Palimanan hingga menjelang akhir tahun ini masih dipusingkan oleh belum selesainya sebagian pembebasan. Padahal bank hanya bersedia mengucurkan seluruh dana jika seluruh

lahan sudah dibebaskan. Hermanto mengatakan beberapa ruas memang mendapat masalah pembebasan lahan, bahkan ada yang sampai ke pengadilan. "Memang ada masyara-

kat yang belum sepenuhnya menerima, ada juga yang membawa masalah ini ke pengadilan, jadi menunggu keputusan pengadilan," katanya.

Jika masalah pembebasan

lahan ini selesai, Hermanto berjanji bisa langsung menjalankan proyek tersebut. "Kalau proyek bisa langsung jalan, tanah bebas bisa langsung jalan [proyeknya]," dia menandaskan.

Pembebasan lahan ini tidak hanya mengganggu pembangunan jalan tol, tapi juga jalan lain, seperti akses ke Bandar Udara Kuala Namu. Pembebasan untuk jalan tol berlangsung mulus, tapi yang bukan tol malah terganggu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, "Kita mengerjakan itu ketika pembebasan lahan selesai. Tapi, begitu selesai, baru dimulai, bukan proyeknya yang langsung selesai."

RAMDHANIA EL HIDA





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☒ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Monorail Beres 2 tahun	<div>- Empat BUMN sudah menyatakan siap bergabung dengan adhi karya menyelesaikan proyek transportasi masal ini</div> <div>- Dirut Adhi Karya menargetkan dalam 1,5 tahun setelah perizinan selesai, sebagian monorail bisa beroperasi. Atau dalam dua tahun semua jalur monorail sudah dapat beroperasi secara penuh</div>			Rp. 8 triliun	<div>- PT. Jasa Marga Tbk</div> <div>- PT. LEN Industri</div> <div>- PT. Industri Kereta Api Indonesia (INKA)</div> <div>- PT. Telkom</div>	

# Dahlan: Monorail Beres 2 Tahun

## Empat BUMN Keroyok Megaprojek Rp 8 Triliun

PEMBANGUNAN megaprojek monorail sudah di depan mata. PT Adhi Karya Tbk bersama konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membangun monorail sepanjang 52 kilometer dengan rute Kuningan-Cawang-Bekasi Timur, serta Cawang-Cibubur. Proyek ini sebagai penyambung monorail Palmerah-Kuningan yang akan dibangun pemerintah provinsi DKI melalui PT Jakarta Monorail.

Empat BUMN sudah menyatakan siap bergabung dengan Adhi Karya menyelesaikan proyek transportasi massal ini. Keempat perusahaan plat merah tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk, PT LEN Industri yang memiliki keahlian di bidang persinyalan, PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA), dan PT Telkom.

Pembangunan monorail yang membutuhkan anggaran Rp 8 triliun ini ditargetkan selesai dalam dua tahun. "Kalau proyek Adhi Karya dan Jakarta Monorail ini selesai, Ibu Kota akan memiliki jaringan monorail yang sangat panjang," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam jumpa pers bersama Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin (7/2). Dahlan berharap, pengguna mobil kelak mau beralih ke angkutan massal ini sehingga kemacetan Jakarta akan terurai. Dia juga menegaskan proyek ini sebagai bentuk komitmen BUMN membantu Pemprov DKI mengatasi kemacetan.

Dahlan bercerita, sehari setelah dilantik, Gubernur DKI Joko Widodo berjalan kaki menuju kantor Kementerian BUMN untuk bertemu dengan Dahlan. Keduanya kemudian membicarakan program perbaikan transportasi dan problem-problem Jakarta.

"Waktu itu, yang kita tawarkan pertama kali adalah monorail yang dari Palmerah ke Kuningan," kata Dahlan. Tetapi BUMN, dalam hal ini PT Adhi

Karya Tbk, akhirnya menarik diri dari proyek monorail Palmerah-Kuningan karena sudah ada agreement lama yang melibatkan PT Jakarta Monorail. "Supaya tidak menyulitkan dan Gubernur Jokowi bisa memutuskan dengan cepat, maka Adhi Karya kita minta untuk menarik diri dari rencana pembangunan monorail Palmerah-Kuningan," tutur Dahlan. Tetapi, lanjutnya, BUMN tetap berkomitmen membantu Pemprov DKI menyelesaikan masalah kemacetan.

Rencana pembangunan monorail yang menyambungkan Kuningan (Jakarta) dengan Bekasi Timur dan Cibubur itulah wujud nyata komitmen BUMN mengurai kemacetan. Menurut Dahlan, proyek ini memang ada untungnya bagi perusahaan, tetapi tidak sangat menguntungkan.

Tetapi Adhi Karya dan empat BUMN lainnya terus maju membangun proyek yang sama sekali tidak menggunakan anggaran negara ini. "Anggap saja ini sebagai penebusan dosa Adhi Karya yang dulu sering disebut memalirkan proyek," kata Dahlan.

Adhi Karya sudah mempresentasikan proyek monorail yang digagasnya kepada Pemprov DKI, kemarin. Banyak hal telah didiskusikan, dan beberapa kesepakatan telah dicapai. "Nanti saya akan bicara khusus dengan pak Jokowi, supaya pengerjaan proyek monorail antara Adhi Karya dan Jakarta Monorail dilombakan saja. Biar memacu kinerja, dan kita lihat nanti siapa yang paling cepat menyelesaikan proyeknya," kata Dahlan.

Soal perizinan, Dahlan juga akan berkonsultasi dengan Jokowi. Ada dua opsi pengurusan izin monorail Adhi Karya. Yang pertama, karena ini melibatkan dua wilayah yaitu Jakarta dan Jawa Barat, pengurusan izin bisa diurus oleh pusat. "Tapi pengurusan izin oleh pusat bisa memakan waktu lama," kata Dahlan.

Opsi kedua, pengurusan izin diserahkan saja kepada Adhi Karya. Supaya perusahaan plat merah ini melakukan terobosan dengan membuat dua perizinan, seolah-olah ada dua pro-

yek. Yang satu izinnnya diajukan kepada Gubernur DKI, sedangkan monorail di wilayah Bekasi Timur dimintakan izinya kepada Walikota Bekasi.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan berharap perizinan yang kini sedang diajukan bisa rampung dalam sebulan. Dengan demikian, dalam enam bulan berikutnya dalam dilakukan tahap engineering sekaligus test track. "Kita akan bangun monorail pendek, dan di situ semua sistem dilakukan pengetesan," kata Kiswo.

Dia menargetkan, dalam 1,5 tahun setelah perizinan selesai, sebagian monorail sudah bisa beroperasi. Atau dalam dua tahun semua jalur monorail sudah dapat beroperasi secara penuh. Proyek monorail ini akan dibangun dengan tiga tahap, yaitu trek Bekasi Timur-Cawang sepanjang 18,14 kilometer. Cibubur-Cawang dengan panjang 13,73 km, serta Cawang-Kuningan sepanjang 11,69 km.



"Kita dahulukan pembangunan dari luar kota, karena lebih gampang pengerjaannya. Misalnya pembangunan di Bekasi dan Cibubur itu tidak terlalu menghambat lalu lintas," katanya.

Kiswo menjelaskan, pihaknya sudah berkeciling menemui perusahaan asal Jepang dan Kanada untuk melihat teknologi monorail yang ditawarkan. Tapi ternyata, teknologi yang ditawarkan perusahaan asing itu sama dengan yang dimiliki PT INKA. Yang membedakan adalah harganya. Perusahaan asing tentu memberi harga lebih mahal.

Karena itu, Adhi Karya lebih sreg menggandeng PT INKA. "Pada akhirnya kalau pertimbangan biaya, tetap dalam negeri lebih baik. Selain itu, kita lebih mengutamakan penggunaan sumberdaya dalam negeri. Apalagi INKA ini sesama BUMN," kata Kiswo.

Dia mengakui, pembangunan monorail ini membutuhkan biaya besar. Itulah alasan Adhi Karya membentuk konsorsium dengan empat BUMN lain, termasuk INKA. Supaya beban biaya dapat ditanggung bersama. Meskipun Adhi Karya tetap menanggung sekitar 50 persen, sisanya dikanal oleh BUMN lain.

"Untuk pembangunan tahap pertama kita akan gunakan uang yang ada, sambil mencari sumber pembiayaan lain dari pinjaman perbankan, obligasi, atau penjualan saham," katanya.

Soal pembagian saham dengan empat BUMN lain, menurutnya, belum dibahas secara terperinci. Tapi dalam waktu dekat pembahasan itu akan dilakukan.

Kiswo menjelaskan, masing-masing BUMN yang bergabung dalam konsorsium ini memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan PT Krakatau Steel juga akan diajak bergabung, karena dalam membangun monorail ini dibutuhkan banyak baja.

"Kalau PT KS bergabung, cost untuk pengadaan baja bisa ditekan," katanya. Dengan bergabungnya Jasa Marga, jalur monorail ini bisa menggunakan sisi luar tol yang dikelola perusahaan plat merah ini. Sedangkan urusan ticketing akan diurus oleh PT Telkom, dan persinyalan oleh PT LEN.

Soal tarif, Adhi Karya memperkirakan sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per tiket. Tapi sekali lagi, angka ini belum final karena masih terus dihitung. Kapasitas angkot dari Bekasi Timur sebanyak 94.000 penumpang per hari, Cibubur 54.000 penumpang per hari, dan Kuningan 43.000 penumpang per hari.

"Kita targetkan dapat menyelesaikan kemacetan 35 hingga 40 persen," kata Kiswo. Pihaknya juga sudah menghitung penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan adanya monorail ini sebesar Rp 5 miliar per hari, atau sekitar Rp 1,5 triliun setahun. (dri/wok)